

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(STUDI BUMDes MAWAR DESA KEPEL, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN
NGANJUK)**

Syndi Dwi Purnamasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
syndidp@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Mawar Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. BUMDes Mawar berdiri bulan November tahun 2016 dan memiliki dua program menarik yaitu peternakan dan pembuatan krecek. Namun masyarakat yang mengikuti kedua program terbilang sedikit, hanya 12 orang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan meliputi prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Kepel melalui BUMDes dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan berjalan dengan baik. Prinsip kesetaraan, BUMDes memberikan masyarakat hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender ataupun golongan. Prinsip partisipasi, BUMDes melakukan pendampingan dan mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari dinas terkait. Namun adanya sosialisasi tersebut tidak diimbangi dengan adanya praktik, sehingga masyarakat menjadi kurang beminat untuk mengikuti program. Selain itu BUMDes juga menyediakan ternak, kandang, dan pakan. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, BUMDes memberikan hak masyarakat untuk memberikan usulan mengenai program yang akan di adakan. BUMDes juga memberikan dana serta bantuan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan program tersebut. Prinsip berkelanjutan, bertambahnya jumlah anggota serta ternak pada program peternakan dapat menjadi kemajuan yang baik untuk program ini kedepannya. Sehingga peneliti memberikan saran untuk mengadakan pelatihan pembuatan pakan serta mewajibkan setiap warga yang memiliki kambing untuk mengikuti program peternakan.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstract

This study aims to describe community empowerment through BUMDes Mawar, Kepel Village, Ngetos District, Nganjuk Regency. BUMDes Mawar was established in November 2016 and has two interesting programs, namely animal husbandry and manufacturing of krecek. But there were only a few people who participated in the two programs, only 12 people. This research is a descriptive study and uses a qualitative approach, namely by means of researchers jumping directly into the field to conduct observations, interviews and documentation. The focus of this research is community empowerment by using the four principles of empowerment including the principles of equality, participation, self-sufficiency or independence, and sustainability. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the empowerment of the Kepel Village community through BUMDes by using the four empowerment principles went well. The principle of equality, BUMDes gives the community the right to vote and freedom to participate in existing programs regardless of gender or class. The principle of

participation, BUMDes provides assistance and conducts socialization by inviting speakers from related agencies. However, the socialization was not balanced with the practice, so that the community became less interested in participating in the program. Besides BUMDes also provides livestock, cages, and feed. The principle of self-reliance or independence, BUMDes gives the community the right to make proposals regarding the program to be held. BUMDes also provides funds and assistance with facilities and infrastructure needed by the program. The principle of sustainability, increasing the number of members and livestock in the livestock program can be a good progress for this program going forward. So the researchers gave advice to conduct training on feed making and required every citizen who had a goat to join the animal husbandry program.

Keywords: Community Empowerment, Village-Owned Enterprises (BUMDes)

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional ialah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Dimana pembangunan nasional juga merupakan proses mengembangkan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang benar, adil dan merata. Pembangunan nasional di Indonesia terkonsentrasi pada pendidikan di kota, yang memunculkan tenaga – tenaga trampil. Hal tersebut menyebabkan wilayah di pedesaan menjadi tertinggal. Selain itu, beberapa faktor pendukung pembangunan seperti modal, teknologi dan sarana komunikasi langka di pedesaan. Sehingga desa di tempatkan menjadi sasaran pembangunan yang bertujuan untuk meminimalis munculnya kesenjangan yang ada di suatu desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi membuat perubahan pola pembangunan daerah terbelakang yang sebelumnya berbasis pada distrik menjadi berbasis pada pedesaan. Adapun data status desa berdasarkan IDM per provinsi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Status Desa Berdasarkan IDM Per Provinsi 2019

Provinsi	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggg
Nad	-	188	145	146	4
Sumatera Utara	-	2	208	184	35
Sumatera Barat	1	59	102	18	1
Bengkulu	-	3	54	33	-
Lampung	-	9	170	38	-
Jawa Timur	43	107	493	15	-
Banten	-	7	84	32	-
NTB	-	13	92	8	-
NTT	-	1	65	228	28
Kalimantan Barat	2	18	88	64	4
Kalimantan Tengah	-	4	59	75	7
Kalimantan Selatan	-	3	119	32	1
Kalimantan Timur	1	3	55	33	-
Kalimantan Utara	-	11	36	-	-
Sulawesi Tengah	-	6	114	51	1
Sulawesi Selatan	-	6	213	66	6
Sulawesi Tenggara	-	-	87	125	1
Gorontalo	-	2	59	12	-
Sulawesi Barat	1	59	102	18	1
Maluku	-	9	36	71	12
Maluku Utara	-	-	34	86	3
Papua Barat	-	-	4	92	124
Papua	-	-	21	267	305
Jumlah Nasional	48	510	2.440	1.694	533

Sumber: Data Kemendes PDTT Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya pergantian pola pembangunan daerah terbelakang yang sebelumnya berbasis distrik menjadi pedesaan telah mampu mengurangi tingkat kategori desa tertinggal di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel di atas, kategori desa berkembang menjadi lebih banyak dari kategori desa tertinggal dengan jumlah 2.440 kabupaten/kota untuk kategori desa berkembang dan 1.694 kabupaten/kota untuk kategori desa tertinggal. Jawa Timur masuk nomor satu kategori desa berkembang paling banyak dengan jumlah 493 kabupaten/kota.

Pada masa sekarang seharusnya menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunan. Salah satunya dengan membuat lembaga berbasis ekonomi yang seluruhnya akan dikelola oleh masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga berbasis ekonomi.

Menurut Mardika (2017:73) “Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental”.

Pemberdayaan masyarakat tidak menjadikan masyarakat bergantung pada beraneka program dari pemerintah. Namun pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan mampu untuk mengedepankan diri ke arah sudut kehidupan yang lebih baik secara berhubungan. Pemberdayaan juga bermaksud untuk menciptakan keberdayaan masyarakat, sehingga bisa berpartisipasi di pembangunan yang berfokus pada rakyat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan menguatkan ekonomi berbasis desa melalui pembentukan lembaga BUMDes. Merujuk pada buku panduan BUMDes (2007) “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”. Dengan kata lain lembaga berbasis ekonomi tidak dibangun berasaskan instruksi pemerintah namun bermula dari adanya sumberdaya yang ada, jadi apabila diurus secara baik akan menggerakkan

roda perekonomian. Sesungguhnya badan usaha tersebut telah diarahkan di UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

“Pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa memiliki tujuan untuk melayani masyarakat pedesaan dalam mengembangkan bisnis yang produktif, dan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi kebutuhan desa dan masyarakat” (Kiky Sreirejeki, 2018:5-10).

BUMDes ialah sebuah pondasi gerakan ekonomi di desa yang berperan sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes selaku lembaga sosial berpacu pada kepentingan masyarakat lewat kontribusi di penyedia pelayan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal ke pasaran. Beragam bentuk BUMDes di setiap desa di Indonesia sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing – masing desa. BUMDes hadir selaku ancangan baru di upaya untuk meningkatkan ekonomi desa beralaskan kebutuhan dan potensi desa (Darwita dan Redana, 2018:53).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Efendi dan Ma’ruf (2019:63-130) “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Podho Joyo) sebagai Lembaga Ekonomi Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” (Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya), (2019) BUMDesa Podho Joyo di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah cukup berperan dan berkontribusi dalam memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, melalui beberapa unit usaha yang ada seperti pasar desa, system menabung, aplikasi *E – payments*, dan harga LPG murah. BUMDesa ini juga sudah bisa dikatakan sebagai BUMDesa mandiri, karena sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dan mampu menyerahkan 15% dari profit pada khas desa. Di sisi lain BUMDesa Podho Joyo juga telah bisa menyelenggarakan rekrutmen dengan ketentuan yang bisa jadi pegawai hanyalah penduduk desa Sukorejo.

Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang sudah membangun BUMDes yakni Kabupaten Nganjuk, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Stimulan Modal Kepada BUMDes

Kabupaten Nganjuk. Diharapkan dengan adanya bantuan modal untuk BUMDes dapat membangun perekonomian desa yang rendah. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang hampir setiap desa sudah mendirikan BUMDes. Salah satunya BUMDes di Kabupaten Nganjuk yang masih berjalan sampai sekarang yaitu BUMDes di Desa Kepel. BUMDes di Desa Kepel ini bernama BUMDesa Mawar. BUMDes Mawar sendiri sudah berjalan sejak bulan November tahun 2016. Dimana BUMDes Mawar memiliki 2 program menarik yaitu peternakan dan pembuatan krecek. Cara kerja pada program peternakan ini yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana ketika ada warga yang berminat untuk mengikuti program ini maka BUMDes akan memberikan seekor kambing untuk mereka ternakkan. Jika warga berhasil menternakkan seekor kambing tersebut, maka hasil dari penjualan ternak tersebut akan dibagi rata antara warga dengan BUMDes. Sedangkan cara kerja pada program pembuatan krecek disini hampir sama dengan program peternakan, yang membedakan pada program ini yaitu BUMDes menyewakan peralatan produksi yang dibutuhkan oleh pihak pengelola.

Desa Kepel merupakan salah satu desa di Nganjuk dengan BUMDesa yang masih berjalan. Potensi yang diunggulkan di desa tersebut yaitu peternakan dan pembuatan krecek. Namun disini BUMDes Mawar hanya melibatkan 12 warga. Warga yang tergabung dalam program – program BUMDes terbilang masih sedikit, sehingga pemberdayaan belum bisa menyeluruh dilakukan kepada seluruh warga. Mengingat potensi desa yang ada di desa Kepel sudah sesuai dengan program – program yang dimiliki oleh BUMDes.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dengan Judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Mawar di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najati, dkk (2005:54) yakni prinsip kesetaraan, keswadayaan atau kemandirian,

partisipasi, dan berkelanjutan dengan memakai teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mawar di Desa Kepel ada 3, pertama dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yaitu Kepala Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk; BUMDes Mawar di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk; dan Masyarakat Desa Kepel. Kedua observasi, dalam teknik observasi ini peneliti melihat dan mengamati bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Mawar yang dilakukan pada program peternakan dan UMKM pembuatan krecek. Ketiga dokumentasi, pada teknik ini peneliti mencari data berupa gambar atau foto program peternakan dan UMKM pembuatan krecek. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model analisis data menurut Milles dan Huberman (1992: 19-20) yang terdiri atas empat prosedur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah diperoleh, bisa dilakukan penjelasan penerapan prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mawar di Desa Kepel dengan menggunakan teori Najati, dkk (2005:54) yang terdiri dari prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Berikut uraian penerapan prinsip – prinsip tersebut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip pokok yang wajib dipegang dalam proses pemberdayaan warga masyarakat ialah adanya kesamaan posisi antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan beraneka program pemberdayaan masyarakat, laki-laki ataupun perempuan. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Kepel, dimana BUMDes mengadakan beberapa program untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tidak ada kesenjangan yang terjadi, yang mana di sini kita sama – sama belajar dan tidak membedakan gender serta tidak melihat dari golongan atas, menengah atau bawah. Seperti yang dipaparkan oleh Bu Tatik

selaku bendahara BUMDes bahwa dalam pelaksanaan program yang di adakan oleh BUMDes antara masyarakat dengan BUMDes sama. Untuk penanggungjawab program – program yang ada, BUMDes menunjuk beberapa anggota BUMDes sendiri. Dengan mengambil anggota BUMDes, diharapkan akan mempermudah koordinasi ketika akan diadakan evaluasi.

Pemberdayaan pada prinsip kesetaraan yang dilakukan oleh BUMDes Mawar Desa Kepel melalui program UMKM pembuatan krecek dan petenakan kambing adalah dengan membangun hubungan kesetaraan melalui pengembangan mekanisme berbagai pemahaman atau keahlian satu sama lain sehingga jadi metode saling belajar. BUMDes mengadakan sosialisasi yang mana seluruh masyarakat desa bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut anggota BUMDes juga mengikuti, jadi disini antara masyarakat desa dengan anggota BUMDes sama, yaitu sama – sama belajar mengenai sosialisasi program yang akan dijalankan. Namun hal tersebut sangat di sayangkan karena kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang ada.

Hasil observasi dari pandangan peneliti mengenai pengadaan sosialisasi yang dilakukan BUMDes Mawar masih tergolong minim. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes mampu mempengaruhi minat masyarakat desa untuk mengikuti program yang diadakan. Masyarakat yang minim akan pengetahuan ditambah sosialisai yang baru dilakukan sekali untuk memperkenalkan program yang ada, menjadikan masyarakat enggan mengikuti program yang ada karena keterbatasan pengetahuan masyarakat desa. Sosialisasi mengenai program yang ada di Desa Kepel berjalan kurang baik karena banyaknya anggota BUMDes yang merangkap kerja. Sehingga anggota BUMDes kurang bisa membagi waktu.

Masyarakat akan termotivasi untuk mengikuti program – program yang diadakan jika input dan output mereka jelas, yang artinya apa yang mereka keluarkan harus sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Pada program – program yang dikeluarkan oleh BUMDes Mawar sudah baik, namun untuk penjelasan mengenai input dan outputnya kurang. Dimana

masyarakat akan lebih tertarik mengikuti program – program yang ada jika mereka mendapatkan output yang menarik seperti gaji atau upah yang besar, mendapatkan bonus jika penjualan tinggi, disediakan tempat untuk pemasaran barang yang mereka produksi. Apabila masyarakat mempunyai pemikiran bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, ada kemungkinan yang dapat terjadi yaitu mereka akan berusaha mencari kegiatan lain dimana disana akan memperoleh imbalan yang lebih besar, seperti lebih memilih kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan dengan imbalan yang sesuai. Sehingga mereka tidak berminat untuk mengikuti program – program yang diadakan oleh BUMDes. Pemaparan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Anggraeni (2016:166) bahwa komunikasi dan sosialisasi merupakan point penting yang harus dilakukan oleh BUMDes. Kurangnya kedua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan warga masyarakat kepada pengelolaan BUMDes.

2. Partisipasi

Program memberdayakan warga masyarakat yang bisa mendukung keswadayaan masyarakat yakni program yang berkarakter partisipatif, digalakan, dilakukan, dipantau dan dipertimbangkan oleh masyarakat. Menurut Nardin (2019:143) penambahan kesadaran masyarakat bisa tercapai lewat ketrampilan terstruktur dapat dikembangkan dari cara partisipatif, pengetahuan regional yang biasanya diperoleh melalui pengalaman bisa dipadukan dengan pengetahuan dari luar. Salah satu masyarakat Desa Kepel mengemukakan pendapatnya mengenai pembuatan krecek yang selama beberapa tahun terakhir sudah digelutinya kepada salah satu pengurus BUMDes, agar bisa memperoleh tambahan dana dan bantuan alat produksi. Adapun dokumentasi terkait kegiatan pembuatan krecek sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pemotongan Krecek



Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2019.

Hasil observasi dari pandangan peneliti, BUMDes Mawar tidak mengadakan program dengan asal-asalan. Terbukti dengan pemberian bantuan berupa modal dan alat produksi yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan krecek, salah satunya alat potong seperti pada gambar di atas. Adanya bantuan alat produksi tersebut dapat memperbanyak jumlah produksi, sehingga hasil yang di dapat juga semakin meningkat.

Tetapi untuk bisa mencapai pada jenjang kemandirian masyarakat butuh waktu dan teknik pendampingan, sehingga perlu mengaitkan pendamping yang memiliki komitmen tinggi bagi pemberdayaan warga masyarakat. BUMDes Mawar melakukan pendampingan pada kegiatan dalam program – program yang ada. Pendampingan dilakukan oleh salah seorang warga yang memang sudah menjadi pendamping di Desa Kepel. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bu Tatik selaku bendahara BUMDes bahwa pendampingan dilakukan oleh pendamping desa. Hal tersebut dilakukan karena memang program yang ada baru di bentuk lebih kurang 2 tahun. Sehingga belum memerlukan pendampingan ekstra. Dalam proses pendampingan berlangsung, masyarakat diikutkan membuat laporan berkaitan dengan program yang dijalankan. Kemudian dilaksanakan pertimbangan guna mengetahui kesulitan dan hambatan yang muncul serta melaksanakan perbaikan dengan dukungan pendamping. Seperti yang dilakukan Pak Arif selaku pendamping desa yakni

memberikan beberapa masukan yang mungkin bisa memperbaiki sistem yang ada, sehingga program bisa berjalan lebih baik lagi. Pemberian masukan yang dilakukan oleh pendamping dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi desa, sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam menerapkan masukan tersebut.

Adedokun,et all., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efisien akan menumbuhkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam peningkatan masyarakat. Dan mengemukakan juga bahwa saat kelompok masyarakat yang tergabung dalam strategi komunikasi, menolong mereka menarik kepemilikan ide pengembangan masyarakat dibanding menilik diri mereka sebagai penerima manfaat pengembangan. Hal itu di perjelas dengan pernyataan Tukiman dkk., (2018:54) bahwa proses komunikasi dapat dikatakan berbuah jika komunikator dapat mengutarakan pesan dan komunikan bisa menerima isi pesan tersebut jadi bisa memberikan hasil dari penyampaian pesan tersebut. Partisipasi yang dilakukan oleh BUMDes terkait dengan program peternakan dan UMKM pembuatan krecek adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan Kepala Desa menjelaskan bahwa BUMDes telah melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari dinas terkait yang berhubungan dengan program tersebut. Meskipun mendatangkan narasumber yang memang sudah berkompeten dalam bidangnya belum membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti.

Selain dari apa yang dipaparkan oleh Kepala Desa, hal tersebut juga di katakan oleh Bu Nurul Syamsiyah selaku penggagas ide pembuatan krecek dan pelaku pembuatan krecek. Beliau mengatakan bahwa saat beliau menjalin kerjasama dengan BUMDes, pembuatan krecek menjadi lebih mudah dengan bantuan dana dan alat yang diberikan oleh BUMDes. Selain bantuan tersebut, dengan adanya sosialisasi yang di adakan oleh pihak BUMDes juga membantu beliau untuk mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam singkong atau ketela. Hal tersebut kurang sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan yang di utarakan oleh Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2010) yaitu

belajar sambil bekerja yang artinya pemberdayaan tidak hanya memberikan informasi, namun harus menyodorkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan keahlian melalui kegiatan masyarakat secara riil. Jadi selain diadakan sosialisasi juga diadakan pelatihan seperti pelatihan pembuatan krecek dan bisa ditambah beberapa penjelasan yang mudah dipahami mengenai pemasaran untuk UMKM pembuatan krecek.

Pada program peternakan juga sama – sama sudah diadakan sosialisasi mengenai jenis kambing dan pakan apa yang sesuai dengan setiap jenis kambing yang ada. Namun selain teori, masyarakat akan lebih mudah jika langsung dilakukan pelatihan pembuatan pakan untuk kambing yang akan digunakan pada program peternakan. Sedangkan untuk program UMKM pembuatan krecek bisa diadakan pelatihan mengenai pemasaran secara online pada masyarakat, sehingga proses penjualan akan berjalan mudah. Kegiatan pelatihan itu sendiri bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang diberdayakan. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh Nawangsari (2016:14) bahwa pelatihan dan motivasi kewirausahaan juga dilakukan dalam bentuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha, sehingga penting diadakannya pelatihan dan pemberian motivasi kepada pengelola UMKM. Dari beberapa penjelasan tersebut, hal yang harus diketahui adalah bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh pihak BUMDes dalam menciptakan peluang kerja bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan menciptakan peluang masyarakat dalam berusaha. Namun ternyata, partisipasi yang dilakukan oleh BUMDes belum menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program – program yang ada. Terbukti dari pemaparan Kepala Desa bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini masih minim.

Hasil observasi peneliti yakni pemikiran masyarakat yang masih kurang percaya, dengan mengikuti program tersebut akan menambah penghasilan mereka. Sehingga masyarakat kurang berminat mengikuti program yang ada. Pendapat tersebut sama halnya seperti yang dikatakan oleh Agunggunanto dkk., (2016:77) program BUMDes tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan SDM dalam melaksanakan BUMDes serta kurangnya pengetahuan

masyarakat desa. Partisipasi masyarakat bisa tumbuh ketika masyarakat merasa membutuhkan dan mempesepsi bahwa aktivitas pengadaan beberapa program oleh BUMDes ialah yang mereka butuhkan, bukan yang dibutuhkan oleh kepala desa maupun perangkat desa.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghormati serta mengedepankan keahlian masyarakat dibandingkan dukungan orang lain. Struktur ini tidak memandang orang miskin sebagai sasaran yang tidak berkemampuan “*the have not*”, melainkan sebagai subjek yang mempunyai sedikit keahlian “*the have little*”. Upaya untuk mengurangi permasalahan kemiskinan melalui pendekatan *bottom up* yakni dengan pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses berjalannya pemberdayaan tersebut masyarakat ditetapkan sebagai aktor penting yang wajib mempunyai kemandirian. Hal tersebut sesuai dengan fakta di Desa Kepel yang memiliki beberapa program, yang mana program – program tersebut berawal dari saran atau usulan masyarakat. Berdasarkan hasil dan pemaparan Bu Tatik selaku Bendahara BUMDes dan Kepala Desa memaparkan bahwa memang beberapa program yang dikelola atau dibawah naungan BUMDes hampir keseluruhan adalah usulan dari masyarakat desa. Saran atau usulan masyarakat muncul ketika desa mengadakan MusDes. Dimana kegiatan MusDes sendiri di adakan setiap satu tahun sekali. MusDes merupakan salah satu forum yang digunakan untuk mengutarakan usul, pendapat, maupun saran yang berhubungan dengan desa oleh masyarakat. Hampir seluruh usulan atau pendapat yang di sampaikan bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, menambah penghasilan untuk masyarakat desa sendiri, dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berwirausaha. Meirinawati, dkk (2018:4) berpendapat bahwa proses pemberdayaan masyarakat ialah sebuah cara yang dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam perencanaan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal.

Masyarakat mempunyai kemampuan untuk menambah pengetahuan mengenai hambatan – hambatan bisnisnya, memahami keadaan lingkungannya, mempunyai pekerja

dan keinginan serta mempunyai asas kemasyarakatan yang telah lama dipatuhi. Pemaparan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Perdana (dalam Pranoto dan Yusuf 2014) bahwa kemandirian masyarakat ialah suatu keadaan yang dialami masyarakat yang ditandai dengan mampu mempertimbangkan, memutuskan dan mengerjakan sesuatu yang dilihat tepat untuk menggapai pemecahan persoalan yang dihadapi dengan mempergunakan keahlian yang dimiliki. Seluruhnya wajib digali dan dijadikan basic bagi sistem pemberdayaan. Adapun dokumentasi terkait proses pemberdayaan pada program pembuatan krecek:

Gambar 3.1
Mengupas ketela



Sumber : Dokumentasi peneliti 2019.

Dari gambar di atas terlihat ada 2 orang sedang mengupas ketela yang merupakan bahan baku krecek. Kedua orang tersebut merupakan tetangga Bu Nurul selaku penggagas program pembuatan krecek. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bu Nurul:

“dari pada saya bingung cari orang untuk membantu saya untuk membuat krecek, ya saya mengajak beberapa tetangga saja untuk membantu mbak. Selain membantu mengurangi pengangguran juga bisa membantu mereka untuk menambah penghasilan setiap harinya”.

Hasil observasi menurut peneliti yakni masyarakat yang memiliki norma – norma bermasyarakat akan mampu menerapkan norma tersebut dalam kehidupannya. Seperti Bu Nurul yang mampu mengatasi kendala dalam usahanya dengan mempekerjakan orang – orang terdekat yang membutuhkan pekerjaan untuk mengisi waktu luang mereka. Pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa Bu Nurul mengetahui bagaimana kondisi lingkungannya sehingga mempekerjakan tetangga untuk mengurangi tingkat pengangguran. Zuliyah (2010:154) mengemukakan bahwa terwujudnya kemandirian dimulai dari partisipan, masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta jika mereka paham akan keuntungan yang didapat dari suatu program untuk meningkatkan ketentraman hidupnya.

Dukungan yang bersifat materiil dari pihak lain perlu dilihat sebagai penopang, sehingga pemberian dukungan tidak justru melemahkan jenjang kemandirian. Bantuan tersebut dapat berupa tambahan dana sponsor, atau kerjasama untuk memasarkan hasil produksi mereka. Bantuan yang dilakukan oleh BUMDes Mawar Desa Kepel yaitu mengundang pihak dari dinas – dinas yang terkait dengan program yang ada untuk melakukan sosialisasi atau pengenalan dan tambahan pengetahuan mengenai program yang ada.

Kemandirian yakni suatu niat serta itikad yang beroperasi mulai dari mengenal hingga menyadari keberadaan manusia sebagai individu, ataupun kelompok masyarakat yang mengetahui lingkungan tempat mereka tinggal. Penduduk desa baik sebagai perorangan ataupun kelompok wajib mengerti makna pokok dan kegunaan untuk pengembangan diri, dengan memanfaatkan potensi yang ada pada diri ataupun lingkungannya, sehingga bisa menumbuhkan mutu kehidupan yang terjamin. Namun masyarakat Desa Kepel belum sepenuhnya mempunyai pemikiran seperti itu. BUMDes Mawar di Desa Kepel bisa dikatakan sudah mandiri dalam pengadaan suatu program yang memang hampir seluruh program adalah usulan dari masyarakat. Namun program – program yang ada belum sepenuhnya mandiri, terbukti dari kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes dalam hal pakan untuk ternak. Dengan adanya sosialisai, diharapkan pada

program peternakan mampu membuat pakan sendiri. Sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk program peternakan, dan dana yang biasanya digunakan untuk membeli pakan bisa digunakan untuk memperbaiki program lain yang mungkin kurang dalam hal pendanaan.

Hasil observasi peneliti yakni kurangnya pemanfaatan dengan cara individu pada sumber daya yang telah ada dibandingkan bergantung pada dukungan luar. Program yang telah diadakan oleh BUMDes, di upayakan agar masyarakat mampu mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin. Jadi pada kesimpulannya pengelolaan bisa diserahkan kepada masyarakat yang sudah ahli menempatkan diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hal tersebut diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Kirowati dan Setia (2018:19) bahwa sebuah organisasi bisa mencapai tujuan dan kegiatannya jika organisasi tersebut mampu untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan butuh direncanakan untuk berkelanjutan, meskipun pada dasarnya peran pendamping lebih dominan diripada masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan tambah berkurang, bahkan akhirnya dihapuskan, karena masyarakat telah bisa mengelola kegiatannya sendiri. Seperti program UMKM pembuatan krecek di Desa Kepel yang di fasilitasi alat oven oleh BUMDes agar mempercepat proses pembuatan krecek. Dengan pengolahan yang cepat otomatis dapat menambah produksi yang semula setiap pembuatan hanya menggunakan 5kg ketela dapat bertambah.

Selain program UMKM pembuatan krecek, warga lebih berharap program peternakan dapat berlanjut. Karena dengan begitu dapat mengurangi warga yang melakukan ternak ayam yang menimbulkan dampak negatif di antaranya mengganggu pengguna jalan atas bau yang ditimbulkan dari kotoran ayam tersebut dan pembuatan kandang di pinggir jalan yang merusak pemandangan. Program peternakan yang sudah dilaksanakan 2 tahun terakhir sudah mengalami kenaikan, yang awalnya diikuti oleh satu kelompok dengan tiga

anggota sekarang ada 2 kelompok dengan 3 orang anggota setiap kelompok. Dengan begitu program ini bisa berlanjut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu usaha terstruktur yang mana dalam hal ini beraneka aspek terlibat baik pemerintah desa ataupun lembaga yang mengelompokkan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat yang akan dikembangkan. Ketika masyarakat tak terlibat dalam usaha pemberdayaan, maka besar kemungkinan akan mendapatkan hambatan dan mungkin berujung kegagalan. Keikutsertaan masyarakat dalam usaha tersebut tidak bisa diremehkan, karena masyarakat lebih mengerti kondisi lingkungannya dibanding orang lain. Namun tidak jarang keikutsertaan dimaksud hanya sebatas pada masyarakat sebagai objek. Sejatinya masyarakatlah yang wajib diutamakan sebagai subjek dalam garis kepengurusannya. Hal tersebut yang sangat berkaitan dengan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pada BUMDes Mawar di Desa Kepel, keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dijadikan sebagai subjek. Hal tersebut terbukti dari pengadaan beberapa program yang ada merupakan usulan dari masyarakat desa sendiri. Dari beberapa usulan yang ada, BUMDes memilih beberapa program yang memang sesuai dengan kondisi pendanaan maupun kondisi lingkungan di Desa Kepel. Adanya usulan tersebut sesuai dengan teori keberlanjutan bahwa adanya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, tentu saja menjadikan masyarakat mempunyai keahlian tersendiri dalam menangani kegiatan sosialnya.

Nursetiawan (2018:79-80)

mengemukakan bahwa “kapasitas sosial yang berpusat pada ketersediaannya pekerja yang bersumber dari masyarakat pedesaan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi di beberapa sektor, jadi dapat dilaksanakan pemberdayaan dan keikutsertaan masyarakat oleh BUMDes guna melahirkan pekerjaan baru. Kapasitas SDM sebagai faktor penopang dalam pemeliharaan BUMDes ke arah professional, oleh karenanya BUMDes bisa menjadi lembaga usaha yang berguna, kreatif, inovatif, adaptif dan akuntabel”. Sementara itu, masyarakat ingin memperoleh manfaat atau kontribusi dari adanya BUMDes ini. Keikutsertaan tersebut

lebih dominan terpaut dengan program yang bersifat pemberdayaan, dengan kata lain kedepannya mereka dapat menaikkan kesejahteraan secara terus menerus. Pemaparan diatas diperkuat dengan pendapat Muryanti (2020:179) bahwa peningkatan pembangunan desa mampu mempengaruhi berkurangnya aktivitas migrasi dari desa ke kota karena adanya lapangan pekerjaan yang mampu memikat minat masyarakat desa. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas SDM desa dan mampu mengembangkan kreativitas dalam beraneka usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mawar didesa Kepel dapat dilihat menggunakan empat dasar pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan.

Prinsip pertama adalah kesetaraan, dimana BUMDes Mawar melaksanakan prinsip tersebut dengan tidak membedakan gender ataupun golongan. Seperti pengadaan sosialisasi yang dilakukan BUMDes. Seluruh masyarakat yang berminat, bisa mengikuti program dan sosialisasi yang ada tanpa persyaratan yang khusus. Sosialisasi yang diadakan tergolong minim. Minimnya sosialisasi tersebut karena ada beberapa anggota BUMDes yang merangkap kerja. Sehingga anggota BUMDes kurang bisa membagi waktunya. Selain tidak adanya persyaratan khusus, BUMDes Mawar juga menunjuk anggota BUMDes sendiri sebagai penanggungjawab program sehingga mudah untuk melakukan koordinasi.

Prinsip kedua adalah partisipasi, BUMDes Mawar melaksanakan prinsip ini dengan pengadaan pendampingan pada program yang ada. Selain itu BUMDes Mawar juga memberikan modal dan bantuan alat untuk UMKM pembuatan krecek serta menyediakan ternak, kandang dan pakan untuk program peternakan.

Prinsip ketiga adalah keswadayaan atau kemandirian, dimana BUMDes Mawar melaksanakan prinsip ini dengan memberikan masyarakat hak suara untuk mengadakan program apa yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Desa Kepel. BUMDes Mawar juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengadakan pakan untuk program peternakan.

Sehingga dalam hal ini BUMDes Mawar belum bias dikatakan mandiri.

Prinsip terakhir adalah berkelanjutan, bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti program peternakan dari satu kelompok menjadi dua kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari tiga anggota dengan ternak yang di awal program berjumlah 20 ekor sekarang menjadi 50 sampai 100 ekor setiap pembelian. Peningkatan yang terjadi pada program peternakan tersebut diharapkan mampu memotivasi masyarakat lain untuk mengikuti program yang diadakan oleh BUMDes.

SARAN

Bersumber dari pemaparan hasil penelitian, bahwa peneliti merekomendasikan sebagian saran yang bisa digunakan agar pemberdayaan yang dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa nantinya menjadi baik:

1. Prinsip partisipasi, pihak BUMDes sebaiknya mendirikan UMKM yang dapat menampung hasil olahan krecek dari warga desa, sehingga warga desa dapat langsung mendapat upah dari olahan tersebut. Selain itu pihak BUMDes mengajarkan pemasaran krecek olahan warga agar warga tergerak untuk mengolah ketela menjadi krecek.
2. Pada prinsip keswadayaan atau kemandirian, pihak BUMDes mengadakan pelatihan pembuatan pakan pada program peternakan.
3. Pada prinsip berkelanjutan, pihak BUMDes sebaiknya mewajibkan minimal 2 orang perwakilan tiap RT untuk mengolah ketela menjadi krecek dan diberi waktu final untuk mengumpulkan olahan krecek tersebut. Dan untuk program peternakan, pihak BUMDes mewajibkan setiap warga yang memiliki kambing untuk mengikuti program peternakan.
4. Peranan perangkat Desa Kepel untuk tidak bosan memberikan nasehat kepada masyarakat dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam program peternakan dan UMKM pembuatan krecek.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada pihak – pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.

- b. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing.
- c. Dra. Meirinawati, M.AP. dan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji.
- d. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Pemerintah Desa Kepel, Pengurus BUMDes Mawar, dan masyarakat Desa Kepel yang membantu proses penelitian.
- f. Dan pihak – pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. PP RPDN. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Najiyati, S., Agus, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forest and Peatlands Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada*. Bogor.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Adedokun, M. O., Adeyamo, C. W., & Olorunsola, E. O. (2010). *The Impact of Communication on Community Development*. *Journal of Communication*, 1(2), 101-105.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Anggraeni, M. R. R S. (2017). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta*. 28(2), 155-167.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. *Locus*, 9(1).
- Kirowati, D., & Dwi Setia, L. (2018). *Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 3(1), 15-24.
- Nardin, Y. (2019). *Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program BUMDes*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 140-145.
- Nawang Sari, E. R. (2016). *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo)*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12-16.
- Nisa Efendi, Khoirun; Farid Maruf, Muhammad. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Podho Joyo) sebagai Lembaga Ekonomi Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. *Publika*, 2019, 7.2.
- Nursetiawan, Irfan. 2018. *Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui Inovasi BUMDes*. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Meirinawati, I. P., & Pradana, G. W. (2018). *Strategi Community Development Based on Local Resources*. In *J. Phys. Conf. Ser (Vol. 953, No. 1, pp. 1-5)*.
- Perdana, F. R. (2019). *Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat melalui Program Kampung Rumah Anak di Badran Kota Yogyakarta*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 3(1), 161-188.
- Srirejeki, K. (2018). *Empowering the Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) for Rural Development: Case of Indonesia*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*. 20(1), 5-10.
- Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). *Pemberdayaan Perempuan Nelayan dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 51-55.
- Zuliyah, Siti. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah*. *Journal of Rural and Development*, 1(2).
- Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2009 Tentang *Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Stimulan Modal kepada BUMDes Kabupaten Nganjuk*.

